

SINERGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PERSAMPAHAN DI PASAR SENTRAL KABUPATEN ENREKANG

Fatima Sudirman^{1*}, Alyas², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the synergy between the government and the community as well as the factors that support and hinder waste management in the central market of Enrekang Regency. Data collection technique used interview, observation and documentation. Data analysis were data reduction, data presentation and conclusions, while the validity of the data using triangulation of sources, techniques and time. The results showed that the synergy of the government and the community in handling waste in the Enrekang central market viewed from 3 dimensions, namely the problem solving aspect through the clean site solid waste service system, aspects of the role of the government in waste management that had not been optimal role of the government both in the form of institutions, operational techniques and regulatory systems and SOPs for the environmental and community services, and aspects of the communication network could be seen that the Government, starting from the Office of the Environment, Districts, and cleaners, had done the right thing to behave and communicate with the community while they were on duty.

Keywords: *government and community synergy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanggulangan persampahan di pasar sentral Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di pasar sentral Enrekang dilihat dari 3 dimensi yaitu dari aspek pemecahan masalah melalui system pelayanan persampahan *clean site*, aspek peran pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada belum optimal peran pemerintah baik berupa kelembagaan, teknik operasional system peraturan dan SOP dinas lingkungan hidup dan masyarakat, dan aspek jaringan komunikasi dapat dilihat bahwa pihak Pemerintah mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan petugas kebersihan sudah melakukan hal yang tepat dalam bersikap dan berkomunikasi dengan masyarakat selama mereka bertugas.

Kata Kunci: sinergitas pemerintah dan masyarakat

* fatimasudirman@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai aktivitas dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan minuman dan barang lainnya dari sumber daya alam. Selain menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan makin hari makin bertambah banyak. Hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak, dan di pihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap dalam Candra (2006).

Masalah sampah menjadi salah satu permasalahan di setiap kota, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Penanganan masalah sampah yang tidak baik akan menimbulkan dampak yang luas, tidak saja bagi lingkungan, tetapi juga berdampak buruk bagi perekonomian dan sosial.

Sampah akan terus diproduksi selama manusia masih hidup dan melakukan kegiatannya sehari-hari di wilayah yang mereka tempati. Volume sampah yang semakin tinggi jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius. Untuk itu

maka perlu adanya suatu pengelolaan persampahan yang baik mulai dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir yang memerlukan lahan khusus (Dwiriansyah, 2004).

Masyarakat memandang sampah sebagai barang yang sudah tidak berguna dan tidak diinginkan, sehingga tindakan yang dilakukan adalah membuangnya di sembarang tempat (Husain, 2010). Persoalan muncul ketika masyarakat memperlakukan sampah sesuai dengan pemahamannya. Masyarakat lebih memilih membuang sampah di tempat sembarang, misalnya di saluran air, lahan kosong, daripada di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Sampah selalu menjadi masalah yang serius, masalah ini timbul karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan sampah. Seperti yang ada di lingkungan Kota Enrekang masih banyak sampah rumah tangga yang dibuang tidak pada tempatnya seperti di pinggir jalan dan di lahan yang belum dimanfaatkan. Keterlambatan pengangkutan sampah dapat menyebabkan sebagian masyarakat merasa sangat terganggu dengan sampah karena menimbulkan bau yang tidak enak di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Jika hal ini dibiarkan, maka akan merugikan masyarakat

karena sampah dapat menimbulkan penyakit.

Langkah-langkah mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, dan masyarakat dalam menangani sampah terkait penanganan sampah serta pelaksanaan yang belum maksimal terhadap regulasi mengenai penanganan sampah. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komitmen yang kuat dan terobosan yang bersifat kreatif-inovatif dari semua pihak untuk mengoptimalkan perangkat regulasi mengenai penanganan dan pembangunan sampah yang berwawasan lingkungan serta merubah paradigma yang sudah tidak mempunyai relevansi dalam konteks membangun kesadaran pemerintah terkait, dan masyarakat dalam menghadapi problematika sampah di negeri ini.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang mengatur mengenai larangan dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional, karena bertujuan untuk menanggulangi, pengurusan, dan perusakan lingkungan sehingga tercipta

lingkungan yang baik, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh rakyat (Hamzah, 2016).

Peningkatan kualitas lingkungan terdiri dari berbagai aspek, Salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah aspek pengelolaan sampah di lingkungan pemerintahan. Menurut Darwin, dalam Wibowo (2010), persampahan telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya akan tergantung pada kemauan Pemerintah Daerah atau Kota dan masyarakat. Kemauan ini dapat dimulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan pengelolaan kota.

Wakil Bupati Enrekang, Asman mengatakan permasalahan sampah yang menjadi penghalang utama untuk Kabupaten Enrekang memperoleh Adipura. Dengan jumlah penduduk yang mencapai ± 190.579 jiwa memang memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Pihak pemerintah mengaku tidak bisa jika tanpa bantuan masyarakat. (Tribunnews. 2019).

Aisiah mengungkapkan Kabupaten Enrekang, masih kekurangan armada truk pengangkut sampah. Hal ini

menyebabkan sejumlah kecamatan mengalami keterlambatan penjemputan sampah karena harus antri menunggu giliran. saat ini baru ada 12 armada truk pengangkut sampah yang beroperasi di Kabupaten Enrekang. Dari jumlah tersebut, tujuh armada diantaranya ditempatkan beroperasi di Kota Enrekang, sementara sisanya ditempatkan di beberapa Kecamatan. (Tribunnews.2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sinergi pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penanggulangan persampahan di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang.

Covey dalam Wati (2013) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar.” Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu

kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien (Hayati, 2014).

Menurut Deadroff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipatgandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok di deskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja sama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting positif, memberdayakan, dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan.

Kunci dari berhasilnya sinergi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek mendasar menurut Rhodes (2007) yaitu: 1) Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga

menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah; 2) Peran Pemerintah (*intergovernmental games*) yaitu bahwa keterpaduan interaksi yang konstruktif antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat; dan 3) Jaringan Komunikasi.

Sampah merupakan salah satu jenis biomassa yang ketersediannya dari hari ke hari cukup melimpah, terutama di kota besar. Sampah juga menjadi perhatian banyak pihak, karena berhubungan langsung dengan kebersihan dan keindahan (estetika) lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di perkotaan. Sampah bisa berasal dari berbagai moda penggunaan seperti sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak, kelebihan dari sesuatu penggunaan (seperti kelebihan makanan), pembungkus (kemasan) barang yang berfungsi melindungi barang, sisa kegiatan produksi (seperti serbuk gergaji, potongan kain, kayu) atau barang yang berfungsi dan tidak digunakan lagi

karena penggunaannya memiliki barang yang lebih baru. Untuk memberi nilai tambah pada sampah, potensi pemanfaatan sampah hanya bisa digali oleh individu yang kreatif. Salah satunya adalah memanfaatkan sampah, organik maupun anorganik sebagai sumber daya kehidupan. (Hermawati, 2014).

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan (Slamet, 2002).

Sampah padat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, menurut Rachman (2011) yaitu 1) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya; 2) Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar; 3) Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk; 4) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah.

Menurut Hermawati, dkk (2015) sumber-sumber sampah adalah: 1) Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*); 2) Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum; 3)

Sampah yang berasal dari perkantoran; 4) Sampah yang berasal dari jalan raya; 5) Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*); 6) Sampah yang berasal dari pertanian; 7) Sampah yang berasal dari pertambangan dan 8) Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan.

Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Sedangkan menurut Alex (2012) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana tertuang dalam pasal 19 di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah. Pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah harus menggunakan bahan

produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam seperti yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 dan 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Enrekang. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang sinergi pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penanggulangan sampah di pasar sentral Enrekang.

Sumber data primer yaitu 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang; 2) Kepala UPTD TPA; 3) Kepala pasar sentral Enrekang; 4) Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup; 5) Camat Enrekang; 6) pedagang pasar setral Enrekang dan 5) Masyarakat sekitar pasar sentral Enrekang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku berkaitan dengan penelitian maupun studi kepustakaan.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah menyebabkan berbagai masalah besar, di antaranya karena jumlahnya kian hari kian besar, pengelolaan yang tidak menyeluruh dari hulu hingga ke hilir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli. Ketiga faktor ini yang dapat mengakibatkan sampah tidak hanya berpotensi menyumbat saluran air, tetapi mengundang berbagai bibit penyakit, bahaya pencemaran dan banjir. Di negara-negara maju, sampah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pengelolaan dari hilir hingga ke hulu. Dengan dukungan perilaku masyarakat yang peduli dalam hal menangani sampah, maka tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan berkenaan dengan sampah. Justru sampah diubah menjadi barang ekonomis untuk berbagai keperluan. Masyarakat dapat hidup sehat dan

nyaman, dan pihak pengelola sampah (baik pemerintah ataupun swasta) diuntungkan dengan pengelolaan yang benar.

Pengelolaan sampah di Pasar sentral Enrekang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan pada Bidang Kebersihan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan. Keterlibatan pihak swasta yang diharapkan dalam kegiatan operasional persampahan meliputi tahap pemecahan masalah, peran pemerintah dan jaringan komunikasi.

Pemecahan Masalah

Kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah.

Hasil analisis disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah sampah yang ada di pasar sentral Enrekang sebagai akibat dari bertambahnya kualitas dan kuantitas

penduduk yang ada di sekitar pasar sentral Enrekang membutuhkan solusi pemecahan masalah. Oleh karena itu, solusi pemecahan masalah sampah melalui system pelayanan persampahan dengan tiga system yaitu system rute, metode pembuangan sampah dengan system “*controlled landfill*” dan pengumpulan dan pengangkutan dengan sistem *clean site*. Sistem pengumpulan sampah di tempat pembuangan oleh petugas kebersihan setiap hari untuk menjaga penumpukan sampah di kios/lods pedagang dan menyediakan sarana dan prasarana berupa, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat pengangkut sampah serta memberikan edukasi atau pemberdayaan kepada masyarakat.

Hasil tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2011) bahwa sistem pengelolaan sampah di Pasar terdiri dari kegiatan perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan sampai TPA. Hal ini pula sesuai dengan pendapat Rizal (2011) bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik,

maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini.

Peranan Pemerintah

Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana setiap kehidupan berdasarkan pada hukum yang berlaku dasar hukum pengelolaan sampah yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang melalui PERDA No. 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atas Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan.

Hasil analisis bahwa pengelolaan sampah yang ada belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ada karena belum optimalnya peran pemerintah baik berupa kelembagaan, teknik operasional system peraturan dan SOP Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pengelolaan sampahnya guna meningkatkan peran kelembagaan yang ada pemerintah Kabupaten Enrekang dapat melihat apa yang terjadi di pasar sentral Enrekang. Kabupaten Enrekang setidaknya dapat melihat Kota Surabaya yang mampu mengelola sampah dengan baik, melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*). Tidak hanya itu, Program 3R dinilai telah menjadi landasan upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat, dalam rangka mengurangi

sampah dan mengambil nilai ekonomis dari sampah (Riski, 2014).

Jaringan Komunikasi

Komunikasi yang jelas juga perlu diperhatikan selama memberikan pelayanan. Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi antar satu sama lain (Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam Wiryanto (2014). Dengan komunikasi yang jelas dan baik tentunya masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan dan regulasi dalam pelayanan yang diberikan. Selain itu, keuntungan bagi pihak Pemerintah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat tentunya dapat lebih mudah mengidentifikasi hal apa saja yang diinginkan dan masalah apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada Pemerintah terkait pelayanan yang diberikan agar lebih mudah, tepat, dan cepat dalam merespon hal tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pihak Pemerintah mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan petugas kebersihan sudah melakukan hal yang tepat dalam bersikap dan berkomunikasi dengan masyarakat selama mereka bertugas. Penilaian terhadap indikator yang mencakup komunikasi Dinas Lingkungan Hidup

dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat sudah baik.

Hasil penelitian tersebut senada dengan Puspasari dan Mussadun (2016) bahwa sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya secara sendiri, tanpa adanya peran masyarakat. Sinergitas yang ada menunjukkan belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di pasar sentral Enrekang. Untuk itu pemerintah harus memperbaiki sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Kunci dari berhasilnya sinergi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek mendasar menurut Rhodes (2007) yaitu: 1) Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan

tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah. 2) Peran Pemerintah (*intergovernmental games*) yaitu bahwa keterpaduan interaksi yang konstruktif antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dan 3) Jaringan Komunikasi (*Networking*). Melalui aspek sinergi tersebut diharapkan suatu daerah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Sinergitas Pemerintah-Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di pasar sentral Enrekang menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan sinergitas pemerintah-masyarakat seperti kegiatan sosialisasi masih sangat kurang dilakukan.

Faktor Pendukung

Adapun beberapa faktor pendukung atau yang menjadi kekuatan pendorong yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kebersihan pasar sentral Enrekang, adalah terdiri atas: 1) Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan persampahan dan kebersihan; 2) Adanya Organisasi dan manajemen instansi yang bersifat koordinatif dan 3) Adanya pemasukan dana yang didapat dari retribusi sampah.

Proses pengelolaan sampah di pasar sentral Enrekang berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atas Penyelenggaraan Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan. Dalam peraturan tersebut dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya, pengumpulan sampah mulai dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenisnya, dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pemrosesan akhir menjadi tanggungjawab pengelola kawasan komersial.

Organisasi dan manajemen pengelolaan sampah merupakan faktor untuk, daya guna dan hasil guna dari pengelolaan sampah. Organisasi dan manajemen juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi, personalia serta manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) untuk jenjang strategis, taktis maupun operasional.

Dalam pemungutan Retribusi Pasar menggunakan PERDA yang berlaku, setiap pedagang dikenakan penarikan iuran retribusi pasar setiap

harinya yang ditarik oleh petugas. Iuran yang dikenakan pedagang dipergunakan untuk membayar gaji petugas dan biaya oprasiolal mesin transportasi truck sampah. Sedangkan uang retribusi yang pedagang bayarkan kepada pengelola pasar akan disetorkan sebagai Pendapatan Daerah.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang dimaksud terdiri dari: 1) Masih kurangnya sumber daya manusia pengelolaan persampahan; 2) Masih kurangnya sarana dan prasaran persampahan dan 3) Partisipasi masyarakat yang kurang.

Ketersediaan sumber daya manusia ternyata juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh staf pengelola kebersihan dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik,

maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini.

Partisipasi sebagai salahsatu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaa persampahan, hal ini sekali lagi merupakan suatu faktor utama dalam melihat berhasil tidaknya pengelolaan persampahan.

Berbagai hal yang ditemui haruslah ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah persampahan, dengan memperhatikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya. Tindakan dan strategi penanggulangan permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di pasar sentral Enrekang, haruslah ditangani dalam lingkungan yang menyeluruh dalam arti kendala yang ditemui ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, sehingga diharapkan strategi pemecahan masalah yang diterapkan akan mampu menanggulangi secara tepat hambatan yang akan muncul. Oleh karena hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan pasar bersumber dari faktor partisipasi masyarakat, maka sosialisasi khususnya penyuluhan pengelolaan kebersihan harus ditingkatkan.

Alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut: 1) Perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi langsung di lapangan kepada pedagang untuk mendorong partisipasi pedagang dalam pengelolaan persampahan; 2) Ditingkatkannya kerjasama kepada semua institusi, baik Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Pemerintah Daerah lainnya; 3) Perlu adanya penambahan personil petugas kebersihan; 4) Perlu adanya penambahan peralatan kebersihan, serta dengan pembagian frekuensi pelayanan, penggunaan kendaraan pengangkutan sampah secara efektif dan efisien serta peningkatan pemeliharaan alat dan 5) Perlu optimalisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, sehingga akan dihasilkan pemasukan yang dapat menutupi biaya operasional pengelolaan persampahan setiap tahunnya, serta adanya pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Pemecahan masalah sampah melalui system pelayanan persampahan dengan tiga system yaitu system rute, metode pembuangan sampah dengan system “*controlled landfill*” dan pengumpulan dan pengangkutan dengan sistem *clean site*. Sistem pengumpulan sampah di tempat pembuangan oleh

petugas kebersihan setiap hari untuk menjaga penumpukan sampah di kios/lods pedagang dan menyediakan sarana dan prasarana berupa, tempat sampah, tempat pembuangan sementara, dan menyediakan alat pengangkut sampah serta memberikan edukasi atau pemberdayaan kepada masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan persampahan di pasar sentral Enrekang dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang ada belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ada karena belum optimalnya peran pemerintah baik berupa kelembagaan, teknik operasional system peraturan dan SOP Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Pihak pemerintah mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan petugas kebersihan sudah melakukan hal yang tepat dalam bersikap dan berkomunikasi dengan masyarakat selama mereka bertugas. Penilaian terhadap indikator yang mencakup komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat sudah baik.

Faktor-Faktor pendukung yang mempengaruhi terlaksananya program kerja Dinas Lingkungan Hidup di dalam mewujudkan kebersihan pasar sentral Enrekang yaitu: 1) Adanya regulasi yang

mengatur penyelenggaraan persampahan dan kebersihan, 2) Adanya Organisasi dan manajemen instansi yang bersifat koordinatif dan 3) Adanya pemasukan dana yang didapat dari retribusi sampah. Sedangkan faktor penghambat/masalah terlaksananya program kerja Dinas Lingkungan Hidup di dalam mewujudkan kebersihan pasar sentral Enrekang yaitu: 1) Masih kurangnya sumber daya manusia pengelolaan persampahan, 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan 3) Partisipasi masyarakat yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Andriani, Tiara. 2011. Peran Pedagang Pasar dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Deardorff Dale S dan Greg Williams. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. USA: Fesserdorff Consultants
- Dwiriansyah, Dinar. 2004. *Studi Peningkatan Pelayanan Operasional Pengelolaan Persampahan di Kota Banda Aceh*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hamzah, Andi. 2016. *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*. Bandung: PT. Alumni
- Hayati, Nafizah. 2014. "Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda". *e-Journal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2, Nomor 4.
- Hermawati, Wati dkk. 2014. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Jakarta: Plantaxia.
- <https://makassar.tribunnews.com/amp/2019/01/11/gagal-adipura-wabup-enrekang-akui-tata-kota-dan-kebersihan-belum-optimal>.
- <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/05/09/dlh-enrekang-akui-kekurangan-armada-truk-pengangkut-sampah>.
- Husain, Ariyanti. 2010. Perilaku Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Pa'baeng-Baeng Kel. Pa'baeng-Baeng Kec. Tamalate Kota Makassar Tahun 2010. *Skripsi tidak diterbitkan* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Najiyati, Sri dan Susilo, Slamet Rahmat Topo. 2011. "Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri". *Jurnal Ketrasmigrasian* Vol. 28 No. 2 (Desember 2011).
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Pemerintah Kabupaten Enrekang. 2014. *PERDA No. 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan*. Enrekang.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*. Jakarta.
- Puspasari, Gandhi Rahma dan Mussadun. 2016. “Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Trenggalek”. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Volume 12 (4) (Desember 2016).
- Rachman, Arfina. 2011. “Gambaran Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Sunggubinas Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Rhodes, R.A.W. 2007. *The everyday life of a minister: A confessional and impressionist tale in Observing government elites: up close and personal*. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
- Riski, Hadijah. 2014. “Studi Analisa Rute Jalan Pengangkutan Sampah di Kota Makassar (Studi Kasus: Kec. Tamalanrea)”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume XI/ Nomor 2 (September 2014).
- Rizal, Mohamad. 2011. “Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala)”. *Jurnal SMARTek*. Vol. 9 No. 2. (Mei 2011).
- Slamet, 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wati, Susilo. 2013. “The Implementation Of Partnership Program In Gresik Regency Based On Governance Perspective (Case Study in PT Petrokimia Gresik)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1, No. 5.
- Wibowo, Hermawan. 2010. Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah Pemukiman di Kampung Kamboja Kota Pontianak. *Tesis*. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang
- Wiryanto. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.